

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya finansialnya untuk mendukung aktivitas operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian terhadap aspek keuangan ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, menjaga kestabilan arus kas, serta mempertahankan efisiensi dalam penggunaan modal. Data dan laporan terkait kondisi keuangan perusahaan menjadi salah satu referensi utama dalam proses pengambilan keputusan, baik oleh manajemen internal maupun pihak eksternal. Bagi para pemangku kepentingan, kondisi keuangan yang baik menunjukkan kredibilitas perusahaan dan menjadi sinyal positif terhadap arah perkembangan bisnis yang dijalankan. Hal ini sangat mempengaruhi keputusan para investor, karena keberlanjutan dan profitabilitas menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan penanaman modal. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi keuangan yang terencana, akurat, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis.

Beberapa tahun terakhir ini, kinerja keuangan perusahaan di Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada pengamatan rata-rata *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Perusahaan Indonesia

Tahun	ROE	ROA
2020	12,03%	6,90%
2021	15,94%	8,22%
2022	13,30%	8,32%
2023	14,47%	8,06%
2024	16,29%	7,62%

Sumber: Refinitiv Eikon (Data diolah peneliti, 2024)

Beberapa tahun terakhir, kinerja keuangan perusahaan di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang dapat dilihat dari perubahan rata-rata *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penurunan kinerja keuangan perusahaan juga terlihat pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana, pada tahun 2024 terindikasi dari melemahnya aktivitas industri dan terjadinya pergeseran sektor ini ke fase kontraksi yang tercermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Indonesia yang menurun dari 52,1 pada Mei 2024, ke 50,7 pada Juni, lalu ke 49,3 pada Juli 2024. Indeks PMI merupakan indikator yang mengukur kesehatan sektor manufaktur dengan memperhatikan sejumlah variabel penting, seperti pesanan baru, produksi, tingkat persediaan, pengiriman pemasok dan kondisi tenaga kerja, nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi, sedangkan nilai di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Penurunan berlanjut pada Agustus 2024 ketika PMI menyentuh 48,9, menunjukkan dua bulan berturut-turut berada di bawah ambang batas netral 50, yang mengindikasikan kontraksi aktivitas manufaktur di sebagian besar subsektor utama (Kontan.co.id, 2024). Kondisi ini diperparah oleh tekanan biaya bahan baku yang terus meningkat, tingginya ketergantungan pada input impor serta derasnya arus produk impor yang menurunkan daya saing produsen lokal, sehingga banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan dan utilisasi produksi yang signifikan. Perlambatan produksi dan melemahnya permintaan domestik menunjukkan tekanan struktural yang nyata pada sektor manufaktur, yang tidak sekadar merupakan fluktuasi musiman, melainkan dampak dari kombinasi faktor ekonomi makro, kebijakan perdagangan dan kondisi pasar global. Penurunan kinerja yang terus berlangsung ini menjadi perhatian utama bagi pengambil kebijakan dan manajemen perusahaan, karena menunjukkan bahwa profitabilitas dan stabilitas operasional industri manufaktur dapat sangat rentan terhadap faktor eksternal, sehingga pengawasan manajemen risiko, efisiensi operasional, dan strategi adaptasi terhadap dinamika pasar menjadi sangat penting untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan (Kompas, 2024). Ini menunjukkan bahwa penurunan kinerja keuangan perusahaan yang

fluktuasi ini mengindikasikan bahwa tidak stabilnya kondisi internal maupun eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan operasional perusahaan. Ketidakstabilan tersebut sering kali diperburuk oleh kelemahan dalam pengungkapan informasi penting, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan yang menimbulkan keraguan di kalangan investor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah tata kelola perusahaan atau yang disebut *good corporate governance* (Riandi & Siregar, 2011). Kegagalan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dapat memicu respon negatif dari para pemangku kepentingan yang pada akhirnya berdampak pada semakin menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Konsep *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah listing di BEI. Setelah adanya krisis yang berkesinambungan sejak tahun 1998, perbincangan mengenai isu tentang *good corporate governance* mulai menjadi topik bahasan penting, khususnya di Indonesia. Salah satu faktor yang dianggap berperan penting atas krisis yang terjadi di berbagai negara dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah perusahaan adalah lemahnya *corporate governance*. Istilah *good corporate governance* muncul karena adanya teori keagenan (*agency theory*) yang diusulkan oleh Jensen & Meckling (1976), di mana kepemilikan suatu perusahaan terpisah dari kepengurusan. Adanya pemisahan ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen (*agent*) yang diberi wewenang oleh pemilik (*principal*) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Agen cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, terutama jika tidak diawasi dengan baik, sehingga memunculkan risiko moral hazard. Konflik kepentingan ini dapat diminimalisasi dengan adanya mekanisme *good corporate governance* (Pratiwi & Hariyati, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good*

Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dari berbagai perspektif dan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa *good corporate governance* merupakan sebuah pedoman yang mengatur operasional perusahaan dalam rangka mendorong pengendalian dan pengawasan untuk melindungi hak dan kepentingan dari para pemegang saham. Penerapan tata kelola yang baik dalam kinerja perusahaan juga merupakan salah satu kunci bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang, serta agar dapat bersaing secara global. Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2002) menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan dan implementasi GCG juga berhubungan dengan citra perusahaan. Menurut Maharani et al (2024) *good corporate governance* (GCG) diyakini memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui berbagai cara. Prinsip GCG yang menekankan transparansi dan keterbukaan informasi membantu pemangku kepentingan, termasuk investor, dalam mengevaluasi kondisi perusahaan secara objektif. Perusahaan yang menerapkan GCG cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada yang tidak menerapkannya.

Keterkaitan antara GCG dan kinerja keuangan perusahaan telah banyak dibahas pada penelitian terdahulu seperti Adamu (2025); Saprudin et al. (2025); Bagh et al. (2025); Lisbeth & Sari (2024); Aviana et al. (2024); Syadeli & Sa'adah (2021); Dakhlallh et al. (2020) penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan GCG tidak hanya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan daya saing jangka panjang perusahaan. Perusahaan sebaiknya terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG dengan meningkatkan peran dewan komisaris, efektivitas audit, dan keterbukaan informasi, sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Namun, juga terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan bahwa GCG berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Darniaty et al., 2023; Kusumawardhany & Shanti (2021) Anggadini & Rahmawati, 2021) . Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa GCG tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi GCG di beberapa perusahaan cenderung masih bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi tanpa disertai komitmen internal yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, dampaknya terhadap aspek finansial tidak selalu terlihat secara langsung dan membutuhkan waktu serta konsistensi dalam implementasinya.

Temuan penelitian yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya dapat menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan perusahaan. Faktor lain ini mungkin dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Faktor tersebut adalah koneksi politik atau juga disebut dengan *political connection*. Menurut Faccio (2006) koneksi politik didefinisikan sebagai hubungan antara perusahaan dengan aktor politik yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan ekonomi. Hubungan ini dapat terjadi ketika salah satu pemegang saham utama, anggota dewan direksi, komisaris, atau eksekutif perusahaan memiliki jabatan di pemerintahan, menjadi anggota parlemen, atau memiliki hubungan pribadi maupun keluarga dengan pejabat politik. Fisman (2001) juga menjelaskan bahwa koneksi politik adalah sumber daya yang berharga bagi banyak perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi transaksi atau kinerja perusahaan. Ketika pasar tidak berjalan dengan baik dari sisi perusahaan, seperti, regulasi, pajak, perlindungan usaha dan hukum yang minim, perusahaan dapat bergantung pada koneksi politik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Menurut Purwanti & Sugiyarti (2017) koneksi politik merupakan hubungan yang terdapat kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya di lingkungan politik, yang berfungsi untuk mendapatkan

benefit untuk kedua pihak. Indonesia adalah negara yang mempunyai pasar berkembang dan memiliki sejarah koneksi politik yang kuat dalam lingkup bisnis (Harymawan & Nowland, 2016). Secara Empiris (Truex, 2014) memberikan bukti bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki *return on asset* 1,5% lebih tinggi dan memiliki *operating profit margin* 3% - 4% lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi parlemen. Karena melibatkan hubungan politik, penelitian ini menggunakan dua perspektif teoritis, yaitu *resource dependence theory* (Pfeffer & Salancik, 1978) dan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan *resource dependence theory*, kehadiran politisi di dewan direksi merupakan bentuk strategi politik perusahaan untuk meminimalkan ketidakpastian lingkungan eksternal perusahaan, terutama dari pemerintah, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Hillman, 2005). Dalam teori ini, perusahaan cenderung membangun hubungan dengan aktor eksternal seperti pejabat pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian dan mengamankan sumber daya yang mendukung keberlangsungan operasional dan keuangan mereka. Disisi lain berdasarkan *agency theory* bahwa perusahaan yang terhubung secara politik adalah pengambil risiko yang lebih mungkin mengalami kegagalan bisnis dan meningkatkan alokasi pemegang saham mayoritas (Ling et al., 2016).

Hubungan GCG dan kinerja keuangan perusahaan dimoderasi oleh koneksi politik dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Khan (2024) pada perusahaan di Pakistan, yang menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik mampu mengurangi dampak negatif dari koneksi politik terhadap kinerja keuangan, karena mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat dapat membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang biasanya melekat pada perusahaan dengan afiliasi politik. Selanjutnya, penelitian oleh Tessema et al. (2024) di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) juga menemukan bahwa koneksi politik berperan penting dalam memoderasi hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan praktik manajemen laba, yang pada akhirnya berimplikasi pada kinerja keuangan perusahaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa koneksi politik tidak hanya memberikan akses pada sumber daya eksternal seperti regulasi, kontrak, atau perlindungan pemerintah,

tetapi juga dapat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga keberadaan koneksi politik dapat menjadi faktor memperkuat ataupun memperlemah dalam menjelaskan hubungan antara GCG dan kinerja keuangan perusahaan di berbagai negara berkembang.

Dengan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mampu menerapkan prinsip GCG dengan baik akan meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, dan meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Penerapan GCG yang efektif tidak hanya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan dengan fokus pada sektor tertentu atau perusahaan di berbagai negara, namun hasil penelitian yang dihasilkan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, masih dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana koneksi politik dapat memoderasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang lebih representatif. Selain itu, penggunaan variabel moderasi berupa koneksi politik memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hubungan antara perusahaan dan aktor politik yang dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah koneksi politik memiliki efek moderasi pada dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
5. Apakah koneksi politik memiliki efek moderasi pada dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?
6. Apakah koneksi politik memiliki efek moderasi pada komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan bukti secara empiris apakah dewan direksi berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan.
- 2) Memberikan bukti secara empiris apakah dewan komisaris berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan.
- 3) Memberikan bukti secara empiris apakah komite audit berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan.
- 4) Memberikan bukti empiris mengenai peran koneksi politik pada pengaruh positif dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- 5) Memberikan bukti empiris mengenai peran koneksi politik pada pengaruh positif dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.

- 6) Memberikan bukti empiris mengenai peran koneksi politik pada pengaruh positif komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang bisa didapat dalam penelitian ini untuk pengembangan teoritis dari temuan dalam penelitian dan memperkaya literatur terkait terhadap kinerja keuangan perusahaan tergambar dari penerapan *good corporate governance* (GCG). Penelitian ini juga mengharapkan adanya penjelasan yang lebih dalam terkait dengan kinerja keuangan perusahaan yang akan diukur dengan melihat kinerja operasional dan kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Serta untuk melihat peran koneksi politik terhadap hubungan antara GCG dan kinerja keuangan perusahaan, dimana koneksi politik digunakan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktisi

Memberikan manfaat untuk praktisi tentang informasi yang didapat dalam penelitian untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan melihat penerapan *good corporate governance* (GCG) yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan yang bisa digunakan untuk perusahaan saat ini. Hasil penelitian dapat digunakan untuk tambahan pemahaman dalam melihat peran koneksi politik sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan strategi peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menyajikan urutan penulisan, terdiri atas lima bagian, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pembahasan Bab I pembahasan yang melatar belakangi penelitian, susunan pertanyaan penelitian, penelitian memiliki tujuan tertentu untuk dilakukan, kontribusi penelitian serta urutan penulisan.

BAB II: Kajian Teoritis

Pembahasan bab II mengenai kajian teoritis dan konsep dasar masing-masing variabel serta perbandingan hasil dari penelitian lainnya, penjelasan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian, dan gambaran penelitian yang akan diuji.

BAB III: Metode Penelitian

Pembahasan bab III model penelitian, penyampelan, perolehan data penelitian, definisi dan pengukuran masing-masing variabel, dan metode untuk pengujian penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pembahasan bab IV mengenai gambaran objek penelitian secara umum, teknik pengolahan data, serta analisisnya.

BAB V: Penutup

Pembahasan bab V mengenai simpulan yang diperoleh dari olahan data, lalu peneliti menyarankan dan menjelaskan keterbatasan apa saja terkait hasil.